

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1
(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2002), hlm. 162-166.
- Ahmad Mustofa Al Maraghi, Tafsir Maraghi, Terjemahan Bahrun Abu Bakar
(Semarang: Toha Putra; 1985), h. 102.
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Sinar Grafika, Jakarta ,2005), hlm. 50.
- A. SONNY KERAFA, “ ETIKA Lingkungan Hidup”, hlm. 47-48.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Brown, Lester R., Tantangan Masalah Lingkungan Hidup (Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kesinambungan Lingkungan Hidup yang Sehat), Diterjemahkan oleh S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor, 1992:, hlm 265-280.
- Djoko Prakoso, Hukum *Penitensier* di Indonesia (Jakarta:Liberty, 1998), hlm. 47.
- Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, “KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA, TEORI DAN PRAKTEK”, hlm. 77-88
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Cet. I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), hlm. 342.
- Masruchin Ruba’i, Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, penerbit IKIP malang, 1994, hl. 5-6.
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Jakarta: Rajawali,2014) hlm. 1
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan,Buku I Umum (Jakarta: Binacipta,1985), hlm. 67

- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1-2.
- Rangkuti, S. S. (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5-6.
- Rusli Muhammad. 2010. Kemandirian Pengadilan Indonesia. FH UII Pres. Yogyakarta. Hlm.146-147
- Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.208-210. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986, h. 5-51.
- Syahrul Mahmud, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 236.
- Syahrul Machmud.2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.Yogyakarta. Hal.162.
- Yusuf Al Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001), h. 46.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah

AL.IJTIMA ‘I-International journal of Government and Social Science, hlm.

177

Brent Fisse dan Jhon Braithwaite, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press 1993.

Dahlia Kusuma Dewi, dkk, Izin Lingkungan Dalam kaitannya Dengan penegakan Administrasi lingkungan Dan Pidana Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (UUPPLH), USU *Law Journal*, Vol.II-No. 1 (2014): 125.

Duff, Antony, and David Garland. "A reader on punishment." (1994). University Press, Oxford

Fawwaz, A. (2024). TEORI PERKEMBANGAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT. *Yustitia*, 10 (1), hlm.135.

Journal Of Social Science Research, Vol. 3 Nomor. 5 tahun 2023, hal. 3982-3991, jurnal Katrin Valencia Fardha, Perkembangan teori-teori hukum pidana, hal. 4

Jurnal *Al-Qisth Law Review*, vol. 7 No. 1 (2023), Abdul azis Muhammad “ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERSEPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN”, hlm. 11

Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024, hlm

Jurnal Swarnabhumi Vol. 9, No. 1, Febuari 2024. Hlm. 2

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus (Jakarta, USAID) h. 512

Makalah; *Pertumbuhan Penduduk Dan Kerusakan Lingkungan Antara BadGovernance Dan Good Governance*, ditulis oleh Dr. Arkanudin, M.Si , Rektor Universitas Kapuas Sintang, Dosen FISIP dan Program Magister Ilmu Sosial UNTAN Pontianak, 26 Maret 2009.

Moh. Fadli, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), h.112.

Muhammad Akib dalam Rusdianto Pratama, Tindak Pidana Pencemaran lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 2 (2015): 106.

Nopyandri, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011).hlm 35

Sagama Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, MUZHALIB Jurnal Pemikiran Hukum,juni 2016, Vol 15. hlm 23

Sahat Maruli T. Simatupang, “Efektifitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan”. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 2 juli 2019. Hlm. 147

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.208-210. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5-51.

Siti Sundari Rangkuti, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia”, Pro Justitia, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999, hlm. 3-4
Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023, Halaman 101-113.

Scientia De Lex, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Hlm. 25-31.

So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika hukum, Vol. 13 no. 3 (2013): 415-427.

Ummah Khaira, 2017, “Kebijakan hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12. Nomor 2 september

Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, “*The Transformation of International Environmental Law*”, enlr, Vol. 13, No. 4, 2011, hlm.352

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

D. Internet

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (*Statistic Samarinda*)
<https://samarindakota.bps.go.id/indicator/12/217/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-samarinda.html>